

BAB II

Potret Film Dokumenter *Dirty Vote*

2.1 Gambaran Umum Film Dokumenter *Dirty Vote*

Film dokumenter *Dirty Vote* menyajikan gambaran mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di Indonesia. Dokumenter merupakan sebagai salah satu bentuk film non-fiksi yang menggunakan gambar dan suara yang direkam dari dunia nyata untuk merepresentasikan kenyataan meskipun teknologi digital memungkinkan modifikasi yang bisa mempengaruhi keaslian (Nichols, 2001). Dokumenter memberikan informasi faktual kepada audiens yang mana sering kali hanya sekedar mengedukasi atau bahkan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu tertentu. Objek penelitian ini memperlihatkan bagaimana media, dalam hal ini film dokumenter, berusaha membentuk persepsi publik mengenai proses demokrasi di Indonesia. *Dirty Vote* mengangkat isu-isu terkait keabsahan proses pemilu dan pengaruh kekuatan politik. Film ini secara gamblang membahas isu manipulasi data, intervensi pemerintah, serta kecurangan sistematis yang diduga terjadi selama Pemilu 2024.

Menurut Bill Nichols (Nichols, 2001), sebuah film dokumenter dapat diklaim sebagai dokumenter berdasarkan beberapa kriteria yang memandu

bagaimana sebuah karya dikategorikan sebagai dokumenter. Salah satu kriteria utama yang adalah bahwa dokumenter harus merepresentasikan dunia nyata atau realitas sosial. Tidak seperti film fiksi yang bertujuan untuk menghibur melalui narasi yang diciptakan, dokumenter mencoba memberikan potret atau representasi yang otentik dari kehidupan nyata. Nichols menjelaskan bahwa film dokumenter merepresentasikan suatu realitas dengan *likeness or depiction* (Nichols, 2001). Dokumenter berupaya untuk memberikan representasi atau gambaran yang memiliki *likeness*, yaitu kemiripan atau kesamaan dengan realitas yang kita kenal dalam kehidupan nyata. Ini artinya, apa yang kita lihat dalam dokumenter adalah sesuatu yang bisa kita kenali dan kita hubungkan dengan dunia nyata. Film dokumenter menggunakan gambar dan suara untuk menciptakan representasi yang membuat penonton merasa mereka sedang mengamati kenyataan secara langsung. Misalnya, dokumenter sering kali menampilkan tempat, peristiwa, atau orang yang dapat kita temui di dunia nyata, sehingga apa yang dilihat penonton dianggap benar-benar terjadi, bukan hasil fiksi atau imajinasi. Dalam hal ini, *Dirty Vote* memenuhi kriteria tersebut karena menyajikan isu-isu yang terjadi di dunia nyata seputar pelaksanaan pemilu di Indonesia. Film ini sebagai penggambaran atas kondisi politik di Indonesia dengan mengupas aspek-aspek seperti manipulasi dalam proses pemilu dan dominasi kekuatan politik yang mengganggu integritas demokrasi.

Selain itu, Nichols juga menekankan bahwa dokumenter sering kali menggunakan apa yang disebut sebagai "mode ekspositoris," di mana narasi dokumenter disajikan secara argumentatif atau persuasif untuk membangun

sudut pandang tertentu. Artinya, film dokumenter memang bisa memiliki sudut pandang tertentu, tetapi tetap bertanggung jawab secara etis untuk menyajikan fakta-fakta yang mendukung perspektif tersebut. Dalam *Dirty Vote*, mode ekspositoris ini terlihat jelas melalui gaya narasi investigatif yang kritis terhadap proses pemilu 2024, menyajikan wawancara dari berbagai narasumber seperti akademisi, aktivis, dan warga yang merasa dirugikan oleh sistem pemilu (CNN, 2024). Melalui narasi yang argumentatif, *Dirty Vote* berhasil menyajikan bukti-bukti yang mendukung perspektif yang dibangun, sehingga memungkinkan penonton untuk memahami dan mempertimbangkan pandangan kritis terhadap pemilu yang disajikan oleh pembuat film.

Kriteria ketiga yang diajukan oleh Nichols adalah bahwa dokumenter tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga bertujuan untuk mempengaruhi persepsi publik. Dokumenter berfungsi sebagai alat untuk menstimulasi pemikiran atau perasaan tertentu dalam masyarakat, bahkan sering kali mencoba mengajak penonton untuk mengambil sikap. Nichols menjelaskan mengenai salah satu cara dokumenter merepresentasikan realita dengan *argumentative representation* yang mana mengacu pada penggunaan narasi dan visual untuk membangun dan menyampaikan argumen atau sudut pandang tertentu tentang topik yang dibahas (Nichols, 2001). Alih-alih hanya menampilkan peristiwa atau fakta secara netral, dokumenter dengan pendekatan ini berusaha meyakinkan penonton tentang sebuah interpretasi spesifik, sikap, atau pemahaman mengenai suatu isu. Argumen ini bisa bersifat eksplisit, di mana dokumenter dengan jelas menyatakan pandangannya, atau

bisa juga lebih implisit, di mana pilihan pengambilan gambar, wawancara, dan pengeditan secara halus mengarahkan penonton ke kesimpulan tertentu. Dalam hal ini, *Dirty Vote* berupaya untuk tidak hanya menginformasikan tentang adanya kecurangan dalam pemilu, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya integritas demokrasi. Pembuat film tidak hanya menampilkan isu secara objektif, tetapi menyusun narasi dengan cara yang dapat mempengaruhi pandangan penonton, khususnya agar lebih kritis dalam menilai transparansi dan kejujuran proses pemilu di Indonesia didukung dengan gambar dan wawancara pihak-pihak tertentu untuk memperkuat argumen pembuat film.

Nichols juga menyoroti bahwa dokumenter biasanya terkait erat dengan isu sosial dan politik yang rumit dan sulit untuk diselesaikan melalui solusi ilmiah atau teknis. Dokumenter sering kali menjadi media untuk mengangkat isu-isu yang penting tetapi kurang mendapat perhatian publik. Film dokumenter sering kali berhubungan dengan isu-isu sosial dan politik yang mana tidak memiliki solusi ilmiah secara absolut, sehingga tak jarang tim produksi film dokumenter cenderung menawarkan satu sudut pandang tertentu dan membujuk audiens bahwa sudut pandang yang mereka tawarkan lebih baik dibandingkan yang lain (Nichols, 2001). Ini menunjukkan bahwa dokumenter, meskipun didasarkan pada kenyataan, tidak sepenuhnya netral dan dapat berpihak pada pandangan atau nilai-nilai tertentu dalam menyampaikan pesan atau representasinya. Dalam *Dirty Vote*, isu politik yang diangkat adalah keabsahan dan keadilan dalam proses pemilu, serta bagaimana pengaruh kekuatan politik dapat

merusak demokrasi. Dengan demikian, *Dirty Vote* tidak hanya menyajikan masalah yang terjadi pada tingkat politik, tetapi juga menggali lebih dalam bagaimana sistem pemilu tersebut berdampak pada masyarakat secara umum, khususnya pada proses demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan kriteria Nichols, *Dirty Vote* dapat dikategorikan sebagai dokumenter karena menggabungkan elemen-elemen faktual, argumentasi yang kuat, dan upaya untuk mempengaruhi publik, sehingga memberikan representasi yang bernilai atas isu-isu sosial dan politik dalam rangka membentuk persepsi publik. Dalam proses produksinya, Dhandy Dwi Laksono terinspirasi oleh keresahannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023 yang menurunkan syarat usia calon wakil presiden (CNN, 2024). Hal ini Dhandy anggap sebagai ancaman terhadap keadilan dan demokrasi di Indonesia. Melalui film ini, Dhandy berusaha untuk mengekspos berbagai masalah yang tersembunyi di balik proses pemilu dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga integritas demokrasi. Proses produksi film ini berlangsung selama dua minggu, termasuk proses pengumpulan data dan wawancara dengan pakar hukum, yang menjadi narasumber utama (JawaPos, 2024). Dalam proses produksinya, *Watchdoc* berkolaborasi dengan sejumlah kelompok masyarakat sipil seperti *Indonesia Corruption Watch*, *Greenpeace Indonesia*, Jaringan Anti Tambang, dan Aliansi Jurnalis Independen (BBC, 2024).

2.2 Sinopsis Film Dokumenter *Dirty Vote*

Dirty Vote adalah sebuah film dokumenter Indonesia yang mengangkat isu mengenai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 di Indonesia. Film ini membawa penonton ke dalam perjalanan yang menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia, di tengah pemilihan umum yang penuh kontroversi. Film ini menyoroti bagaimana proses pemilu yang seharusnya berjalan secara adil dan transparan, justru diwarnai oleh dugaan kecurangan yang dilakukan oleh aktor-aktor politik tertentu. Film ini mengangkat tema besar mengenai integritas demokrasi di Indonesia, menyoroti berbagai masalah yang muncul dalam proses pemilu, seperti manipulasi data, intervensi politik, serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh aktor-aktor politik tertentu. Film ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana elit politik menggunakan kekuatan mereka untuk mempengaruhi hasil pemilu demi keuntungan pribadi, yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri. Melalui gaya investigatif, *Dirty Vote* menghadirkan wawancara dengan pakar hukum dan akademisi, serta mengungkapkan kekhawatiran akan dampak kecurangan pemilu terhadap kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Latar cerita berfokus pada pandangan kritis dari tiga pakar hukum tata negara terkemuka, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari, yang memberikan fondasi kuat untuk memahami situasi politik dan dinamika kekuasaan yang terlibat. Zainal menyebut film ini sebagai "monumen" untuk mengingatkan publik akan manipulasi yang dilakukan oleh elit politik, sementara Bivitri menekankan bahwa kecurangan pemilu tidak bisa

dianggap sepele. Feri menyoroti pentingnya edukasi publik mengenai bagaimana pemilu bisa dimainkan oleh politisi demi keuntungan mereka sendiri. Film ini kemudian menampilkan berbagai cuplikan pemberitaan yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan keluarganya, serta dugaan keterlibatannya dalam mendukung kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Tema utama yang diangkat mencakup bagaimana elit politik, melalui dinasti dan kekuasaan mereka, mempengaruhi jalannya pemilu demi keuntungan pribadi (BBC, 2024).

Diskusi dalam film ini juga mengangkat masalah serius seperti netralitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan dugaan manipulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Feri Amsari menyoroti independensi Bawaslu yang dipertanyakan, terutama terkait hubungan dekat Juri Ardiantoro, ketua Bawaslu, dengan Presiden Jokowi. Zainal menyoroti kasus di mana KPU mengizinkan Partai Gelora lolos verifikasi meskipun terdapat kejanggalan, dugaan manipulasi data dalam proses verifikasi partai politik serta pelanggaran etika oleh anggota KPU, termasuk Ketua KPU, Hasyim Asy'ari.

Film ini juga mengungkap penyalahgunaan program bantuan sosial (bansos) sebagai alat politik. Bivitri Susanti mengaitkan lonjakan anggaran bansos menjelang pemilu dengan praktik politik transaksional (*pork barrel politics*), di mana dana negara digunakan untuk meraih dukungan elektoral. Bivitri menjelaskan bahwa meskipun Presiden Jokowi tidak mencalonkan diri, pola ini tetap terlihat dalam pemilu 2024.

Kontroversi terkait Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi fokus film ini, terutama setelah MK tiba-tiba mengabulkan permohonan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, meskipun sebelumnya MK menolak 31 kali permohonan terkait ambang batas pencalonan presiden (detikjatim, 2024). Pakar-pakar hukum dalam film ini mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap adanya konflik kepentingan dan potensi pelanggaran etika di dalam tubuh MK. Ketiga pakar tersebut mengungkapkan bahwa kontroversi mengenai putusan MK merupakan puncak dari berbagai isu dalam pemilu 2024 di Indonesia.

Bivitri mencatat adanya konflik kepentingan dan pelanggaran etik dari Ketua MK yang merupakan paman Gibran. Ia juga menyebut adanya indikasi transaksi di balik keputusan MK. Bivitri menyoroti perbedaan pendapat di antara hakim-hakim MK, dengan tiga hakim mendukung keputusan, sementara empat hakim menolak dengan alasan di luar kewenangan MK. Zainal mencatat perubahan drastis sikap hakim setelah sesi makan siang, mengindikasikan kemungkinan adanya lobi di balik keputusan.

Dengan pengungkapan kasus demi kasus kecurangan dan manipulasi politik yang sistematis, *Dirty Vote* memaksa penonton untuk merenungkan masa depan demokrasi di Indonesia. Film ini tidak hanya membuka mata, tetapi juga mengajak audiens untuk merenungkan peran kekuasaan dalam demokrasi dan bagaimana elit politik dapat mempengaruhi jalannya pemilu untuk kepentingan mereka sendiri.

2.3 Kontroversi Film Dokumenter *Dirty Vote*

Film *Dirty Vote* bukan hanya sekadar sebuah karya dokumenter melainkan juga mencerminkan dinamika politik dan sosial yang kompleks dalam konteks pemilu di Indonesia. Kontroversi merupakan perdebatan atau ketidaksetujuan mengenai suatu hal yang menimbulkan pendapat yang sangat bertentangan (Pal, 2018). Kontroversi dapat memuncak dengan disinformasi yang secara sengaja disebar untuk mempengaruhi opini publik, terutama terkait isu-isu sensitif seperti politik (Lange, 2019). Misalnya, menjelang pemilu, sering ada upaya untuk memanipulasi kampanye politik melalui penyebaran informasi palsu. Selain itu, media sering kali memfokuskan diri pada topik kontroversial, yang dapat mempolarisasi opini publik dan memicu emosi, sehingga membuat topik tersebut lebih menarik tetapi juga lebih sulit untuk diatasi secara obyektif (Lange, 2019).

Kontroversi berartikan perdebatan (KBBI, 2024) dimana dalam konteks film dokumenter ini, kontroversi merujuk pada perdebatan dan ketidaksepakatan yang muncul akibat pandangan berbeda terhadap narasi yang disajikan dalam film ini. Kontroversi dalam konteks *Dirty Vote* muncul karena film ini mengangkat isu-isu sensitif seperti dugaan kecurangan pemilu, dugaan intervensi pemerintah, ambang batas pencalonan, konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi, dan kritik terhadap integritas proses demokrasi. Namun rupanya film ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai netralitas dan keobjektifan narasi yang disampaikan, yang memicu reaksi beragam dari berbagai kalangan, termasuk publik, akademisi, dan pihak-pihak terkait.

Kontroversi ini terjadi karena *Dirty Vote* menampilkan perspektif kritis terhadap pemerintah dan sistem pemilu di Indonesia, yang dilihat sebagian pihak sebagai serangan terhadap legitimasi institusi-institusi politik. Film ini menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, yang terkenal dengan pandangan mereka yang kritis terhadap pemerintah. Ketiga pakar ini memiliki rekam jejak panjang dalam advokasi terhadap transparansi dan keadilan politik, namun kehadiran mereka dalam film memicu diskusi mengenai objektivitas narasi yang dibangun. Sebagai bagian dari civil society, mereka dianggap mewakili suara masyarakat yang kritis, tetapi tidak semua pihak setuju bahwa mereka bisa menjadi satu-satunya representasi dalam mengangkat isu dugaan kecurangan pemilu.

Kontroversi terjadi karena narasi dalam film ini dianggap oleh sebagian pihak terlalu berpihak dan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada pihak pemerintah untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan atas kritik yang dilontarkan. Ketidakseimbangan ini memicu perdebatan apakah *Dirty Vote* benar-benar memberikan gambaran yang utuh dan adil mengenai situasi politik yang sedang berlangsung, atau justru memiliki agenda tertentu yang memengaruhi narasi tersebut.

Kontroversi dapat muncul dalam konteks media, terutama akibat dari perbedaan narasi yang disajikan oleh pembuat konten media tersebut dengan persepsi publik atau kepentingan institusi yang berlawanan (Lange, 2019). Dalam lingkungan media yang semakin terfragmentasi, terdapat polarisasi sosial dan politik yang dipicu oleh seleksi informasi berdasarkan preferensi

individu, serta penggunaan media untuk tujuan tertentu, termasuk propaganda atau pembentukan opini. Ini dapat menyebabkan perbedaan pandangan yang memicu kontroversi, karena informasi yang disajikan sering kali bertentangan dengan kepentingan kelompok lain.

Objektivitas sering kali menjadi isu yang signifikan dalam film dokumenter, pemilihan narasi dan proses penyuntingan dapat menciptakan sudut pandang tertentu yang mungkin tidak merepresentasikan realitas secara menyeluruh (Nichols, 2001). Pembuat film, yang sering memiliki pandangan atau agenda tertentu, dapat memengaruhi arah cerita dan penyajian informasi, sehingga menghasilkan representasi yang tidak seimbang. Selain itu, ketergantungan pada sumber informasi tertentu dapat memperburuk bias, terutama jika film hanya mengandalkan satu perspektif atau narasumber tanpa mencakup beragam sudut pandang yang relevan. Menurut Nichols (Nichols, 2001), dokumenter tidak dapat sepenuhnya netral karena sudut pandang pembuat film selalu mempengaruhi narasi yang disajikan. Hal ini sejalan dengan kritik yang dihadapi oleh *Dirty Vote*, di mana beberapa pihak menilai narasi yang disajikan terlalu berpihak.

Menurut Brian Winston, dokumenter dapat memiliki sudut pandang subjektif karena teknologi digital dan manipulasi gambar mengubah hubungan antara dokumenter dan kenyataan (Winston, 2008). Digitalisasi memungkinkan distorsi atau manipulasi realitas yang direkam, yang pada akhirnya dapat membawa subjektivitas dalam cara dokumenter menggambarkan kenyataan. Selain itu, Winston juga menyatakan bahwa

penerimaan publik terhadap dokumenter sering kali tidak kritis, dan cenderung menganggap representasi dalam film sebagai cerminan langsung dari kenyataan (Winston, 2008).

Kontroversi mulai memanasi ketika film ini diunggah di kanal YouTube *Dirty Vote* dan PSHK Indonesia pada tanggal 11 Februari 2024, tepat saat memasuki masa tenang pemilu. Sutradara film ini, Dandhy Laksono, mengungkapkan bahwa film ini dirilis pada waktu tersebut dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memahami berbagai indikasi kecurangan yang mungkin terjadi dalam pemilu (Kompas, 2024). Namun, perilisannya pada masa tenang memicu kekhawatiran bahwa film ini akan memengaruhi persepsi dan keputusan pemilih, sehingga menciptakan potensi gangguan dalam proses demokrasi. Beberapa pihak merasa bahwa waktu perilisan film ini menimbulkan potensi pelanggaran hukum, khususnya terkait aturan kampanye selama masa tenang pemilu. Beberapa pihak memuji film ini sebagai karya yang berani dalam mengangkat isu-isu sensitif yang jarang dibahas, sementara yang lain mengkritiknya karena dianggap bias dan terlalu fokus pada sisi negatif pemilu.

Meskipun dalam film dokumenter bisanya diidentifikasi dengan dunia nyata, realitas yang direpresentasikan dalam dokumenter tetaplah hasil dari berbagai pilihan teknis dan kreatif seperti sudut pengambilan gambar, editing, dan penyusunan narasi (Nichols, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa dokumenter bisa memanipulasi representasi dunia nyata untuk menyampaikan pandangan atau pesan tertentu, yang bisa memunculkan bias. Selain itu,

disebutkan bahwa gambar yang kita lihat dalam dokumenter sering kali dipercayai sebagai representasi akurat dari dunia nyata, meskipun sebenarnya gambar tersebut bisa digunakan untuk tujuan tertentu. Ini menunjukkan bagaimana dokumenter, meskipun terlihat objektif, tetap dapat membawa bias tergantung pada sudut pandang pembuat film.

Kontroversi yang muncul dalam film dokumenter *Dirty Vote* juga dapat dilihat melalui lensa etika pembuatan film dokumenter. Para pembuat film memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati martabat dan hak-hak individu atau kelompok yang ditampilkan, serta mempertimbangkan dampak dari representasi terhadap subjek-subjek tersebut (Nichols, 2001). Selain itu, pembuat film dituntut untuk menciptakan representasi yang akurat dan adil, bukan sekadar mengejar sensasionalisme yang berpotensi merugikan subjek yang difilmkan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kontroversi ini sangat beragam, termasuk publik, akademisi, pemerintah, serta media. Publik memberikan reaksi yang beragam. Sebagian menganggap film ini sebagai karya penting yang membongkar kecurangan politik, sementara yang lain mengkritiknya sebagai propaganda atau kampanye hitam (black campaign). Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI), misalnya, melaporkan sutradara Dandhy Laksono dan tiga akademisi ke Bareskrim Polri dengan tuduhan bahwa film ini bertujuan menciptakan kegaduhan politik dan menyudutkan salah satu pasangan calon presiden (Kompas, 2024). Di sisi lain, Zainal Arifin Mochtar, salah satu narasumber film, menegaskan bahwa materi dalam *Dirty Vote* berbasis riset

dan tidak berpihak, meskipun ia mengakui adanya perdebatan terkait substansi data yang diangkat dalam film.

Dengan demikian, kontroversi seputar *Dirty Vote* muncul dari kombinasi antara konten film yang sensitif, pilihan narasumber yang kritis, serta waktu perilisan yang bertepatan dengan masa tenang pemilu. Hal ini menjadikan *Dirty Vote* sebagai salah satu karya dokumenter yang tidak hanya memicu diskusi intelektual, tetapi juga perdebatan politik yang melibatkan banyak pihak.